

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hartono Sri Redjeki. 2000. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Bandung: PT Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2002. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muslehuddin, Muhammad. 1999. *Menggugat Asuransi Modern*. Jakarta: Lentera.
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Intermasa
- Rastuti, Tuti. 2011. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sastrawidjaja, Man Suparman. 2004. *Hukum Asuransi*. Bandung: Alumni.
- Sastrawidjaja, Man Suparman. 2003. *Aspek – Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung: Alumni.
- Sianipar J Tinggi & Jan Pinontoan. 2003. *Surety bond sebagai Alternatif dari Bank Garansi*. Jakarta: CV Dharmaputera.
- Soekardono, R. 1983. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Sjahdeini, Remi. 1993. *Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Sofyan, Sri Soedewi Masjchun. 1982. *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*. Yogyakarta: Liberty.
- Wardana, Kun Wahyu. 2009. *Hukum Asuransi*. Bandung: CV Mandar Maju.

B. Jurnal / Artikel / Publikasi / Skripsi – Tesis

- Adhitia, Uyung. 2011. *“Surety bond sebagai Alternatif Jaminan dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia”*. Tesis: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Afrizal, Firdian. 2010. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerbitan Surety bond Oleh Perusahaan Asuransi Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Oleh Pemerintah”*. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta.
- Amron. 2012. *Kinerja Bisnis Penjaminan Surety bonds di Indonesia*. Jurnal Asuransi dan Manajemen Risiko AAMAI Vol. 1, No. 1.
- Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2015. *Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017*.
- Otoritas Jasa Keuangan Direktorat Statistik & Informasi IKNB. 2016. Statistik Lembaga Keuangan Khusus.
- Otoritas Jasa Keuangan Direktorat Statistik & Informasi IKNB. 2016. *Statistik Perasuransian Industri Keuangan Non-Bank 2015*.
- Santoso, Andri Widi. 2012. *Analisis Produk Asuransi Surety bond pada PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Solo*, Tugas Akhir: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sinaga, Hendra Hot Gunawan. 2011. *“Dampak Hukum Pelaksanaan Surety bond di DKI Jakarta”*. Tesis: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

C. Peraturan perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1924 Nomor 557).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).

Keppres Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5770).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5990).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5992).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6013).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6015).

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keppres Nomor 14 A/0 tahun 1980 tentang Pelaksanaan APBN / APBD dan Bantuan Luar Negeri.

D. Internet

_____. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dsar-dasar-hukum-asuransi/> diakses tanggal 25 Agustus 2016.

Asuransi Jasa Raharja. 2016. *Sejarah*. <https://www.jasaraharja.co.id/tentang-kami/sejarah> diakses tanggal 10 November 2016.

Bastaman. 2016. *Penjaminan Kena Gunting UU*. <http://www.majalahreviewweekly.com/read/595/penjaminan-kena-gunting-uu> diakses tanggal 26 Juli 2016.

- Dewan Perwakilan Rakyat RI. 2016. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penjaminan*. www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20150626-020848-5826.pdf diakses tanggal 11 Januari 2017.
- Farisah, Dina, 2016. *Konsorsium Infrastruktur Terusik UU Penjaminan*. <http://keuangan.kontan.co.id/news/konsorsium-infrastruktur-terusik-uu-penjaminan> diakses tanggal 11 Februari 2017.
- Kementerian Keuangan. 2014. *Infografis APBN 2015*. <http://www.kemenkeu.go.id/wide/apbn2015> diakses tanggal 5 Mei 2017.
- Khumaidi, M. Arief. 2014. *Perusahaan Penjamin Kredit Daerah untuk UMKM*. <http://setkab.go.id/perusahaan-penjamin-kredit-daerah-untuk-umkm/> diakses tanggal 11 Februari 2017.
- Soetrisno, Noer. 2015. *Penjaminan Kredit UKM: Pengalaman Kita dan Negara Lain*. smecda.com/wp-content/uploads/2015/.../07_08_Penjaminan_Kredit_UKM_Noer.pdf diakses tanggal 11 Januari 2017.
- Mozza, Rara. 2015. *OJK Revisi Ketentuan Surat Jaminan*. <http://www.mozza-bonding.com/2015/10/ojk-revisi-ketentuan-surat-jaminan.html> diakses tanggal 11 Januari 2017.
- UAF Jaminan Kredit. 2014. *Tentang UAF*. <http://www.uafjamkr.co.id/tentang-uaf/> diakses tanggal 11 Januari 2017.
- Vebri, Havid. 2015. *Konsorsium Asuransi Penjamin Proyek PUPR*. <http://keuangan.kontan.co.id/news/konsorsium-asuransi-penjamin-proyek-pupr> diakses tanggal 4 Mei 2017.